



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf a Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian

- Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Koordinator Penilaian Mandiri
 - a. Menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;

- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan Area of Improvement, dan rencana aksi tindak lanjut kepada Sekretaris Utama.

3. Ketua Asesor

- a. Memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
- b. Menyusun dan menyampaikan draf laporan Hasil penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, Area of Improvement, dan rencana aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri; dan
- c. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.

4. Wakil Ketua Asesor

- a. Membantu memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri;
- b. Mengkoordinasikan Tim Sekretariat dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan penilaian mandiri.
- c. Membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi antara lain skor hasil penilaian mandiri, perumusan Area of Improvement, dan rencana aksi tindak lanjut; dan
- d. Membantu pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas.

5. Asesor

- a. Mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. Melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di unit organisasi masing-masing;
- c. Mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;
- e. Mengikuti proses penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan Area of Improvement, dan rencana aksi tindak lanjut;
- f. Mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
- g. Melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi perbaikan Area of Improvement dan rencana aksi; dan
- h. Menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

6. Sekretariat Penilaian Mandiri

- a. Menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. Dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

- c. Membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- d. Memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
- e. Membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
- f. Membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan Area of Improvement, dan rencana aksi tindak lanjut

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 181 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan/Unit Organisasi
I.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Utama	
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	
III.	Ketua Asesor	:	Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
IV.	Wakil Ketua Asesor	:	Resa Anggriani	Biro Perencanaan dan Keuangan
V.	Asesor	1.	Larasati Aisyah Retno Anjani	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2.	Verawaty Simorangkir	
		3.	Mei Rini Nainggolan	
		4.	Biantri Raynasari	
		5.	Koco Doyo Mielopo	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		6.	Mia Diana Putri Suryadi	
		7.	Deddy Andrianto	
		8.	Putry Vibry Hardyani	
		9.	Setiawan Rahandi Sabri	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		10.	Rasmita Juliana Sitepu	
		11.	Joanne Salres Ramadhani	
		12.	Mohamad Arif Purwanto	

	13.	Ermawanto	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	14.	Eva Sinaga	
	15.	Yasmine Permata Sari	
	16.	Muhammad Ardian Wibowo	
	17.	Mario Duwi Cahyo	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	18.	Frama Nugraha	
	19.	Joko Budi Sulistiyo	
	20.	Syamsul Alamsyah	
	21.	Hajeng Hayu Wandahira	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	22.	Sofie Maghfira	
	23.	Agita Marelia Ulfa	
	24.	Ivana Suprpto	
	25.	Andy Martanto	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
	26.	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	
	27.	Mira Erviana	
	28.	Pandu Guterres	
	29.	Sugianto	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	30.	Dissa Patricia	
	31.	Audita Octaviani	
	32.	Eska Pratama	
	33.	Hilma Oktaviani	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
	34.	Mega Chandra Sera	
	35.	Mahsa Elvina Rahmawyanet	
	36.	Frans Yoenero	
	37.	Yohana Surat Payon Philips	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	38.	M. Andhika Rangga Lazuardi	
	39.	Ali Masrochan	
	40.	Inggarrestu Pradiptaningtyas	

		41.	Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Sertifikasi Profesi
		42.	Andy Purwa Sejati	
		43.	Lutfi Prafidya Ferisa	
		44.	Rezang Patuh Rohmad	
		45.	Muhamad Dwi Sumanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		46.	Abdul Gafur Darussalam	
		47.	Aryandhika Sandya Nugraha	
		48.	Desak Putu Ayunda Putri	
		49.	Sri Aditya Nur Pratama	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		50.	Paramitha Agdina Pusparini	
		51.	Yustitia Fernando	
		52.	Diani Bahri Puteri	
		53.	Jefry Seftian	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		54.	Tri Astutik	
		55.	Putri Triyandini	
		56.	Benny Leopold Dumais	
		57.	Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat
		58.	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	
		59.	Eli Firdawati	
		60.	Ghina Rosyda	
		61.	Tino Yuka Aldila	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		62.	Budi Bowo Laksono	
		63.	Winny Adlina Pratomo	
		64.	Hery Fadhly Zulni	
		65.	Citra Yulian Kristanti	Pusat Data dan Informasi
		66.	Aprilia Pratiwi	
		67.	Sazzali	
		68.	Jidda Hadiyana	

VI.	Sekretariat Penilaian Mandiri	69.	Budi Setyo Nugroho	Biro Perencanaan dan Keuangan
		70.	Milania Pradani	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI